



Pemaknaan Mahasiswa Ilmu Komunikasi terhadap Pembatasan Konten Politik di TikTok: Analisis Kualitatif dalam Perspektif Hegemoni Gramsci

Ni Kadek Ayu Kania Abhinita Putri¹, Jonathan Jacob Paul Latupeirissa²

^{1,2}Universitas Pendidikan Nasional Denpasar Selatan Bali, Indonesia

E-mail: kaniakanputri@gmail.com, jonathanlatupeirissa@undiknas.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2025-12-08 Revised: 2026-01-15 Published: 2026-02-12	This study explores the phenomenon of political content restrictions on TikTok through the perspectives of Communication Studies students. Amid the increasing use of TikTok as a means of political communication, its opaque content moderation policies have given rise to a discourse on information control in the digital space. This qualitative study uses a phenomenological approach to explore the essence of students' subjective experiences with content restriction mechanisms, which are then analyzed using Antonio Gramsci's theory of hegemony. Data were collected through in-depth interviews with five Communication Studies students who actively produce and consume political content. The results reveal three typologies of interpretation (1) technical consensus on restrictions considered as a natural rule of the platform; (2) covert domination interpreted as subtle censorship; and (3) the digital state within the platform perceived as possessing hegemonic political authority. These findings indicate that TikTok operates as an organic intellectual, guiding user consciousness through algorithms. Despite counter-hegemonic efforts through the use of coded language (<i>algospeak</i>), digital hegemony remains dominant in shaping students' self censorship behavior. This study concludes that political content restrictions on TikTok constitute a form of subtle social control that threatens the quality of democracy in the digital public sphere.
Keywords: <i>TikTok;</i> <i>Content Restrictions;</i> <i>Communication Science Students;</i> <i>Gramsci's Hegemony.</i>	

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2025-12-08 Direvisi: 2026-01-15 Dipublikasi: 2026-02-12	Penelitian ini mengeksplorasi fenomena pembatasan konten politik di <i>TikTok</i> melalui sudut pandang mahasiswa Ilmu Komunikasi. Di tengah meningkatnya penggunaan <i>TikTok</i> sebagai sarana komunikasi politik, kebijakan moderasi konten yang tidak transparan menimbulkan diskursus mengenai kontrol informasi di ruang digital. Penelitian kualitatif ini menggunakan tipe pendekatan fenomenologi untuk menggali esensi pengalaman subjektif mahasiswa terhadap mekanisme pembatasan konten, yang kemudian dianalisis menggunakan teori hegemoni dari Antonio Gramsci. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap lima mahasiswa Ilmu Komunikasi yang aktif memproduksi dan mengonsumsi konten politik. Hasil penelitian menunjukkan tiga tipologi pemaknaan meliputi (1) konsensus teknis pembatasan dianggap sebagai aturan wajar <i>platform</i> ; (2) dominasi terselubung yang dimaknai sebagai sensor halus; dan (3) negara digital dalam platform dianggap memiliki otoritas politik yang hegemonik. Temuan ini mengindikasikan bahwa <i>TikTok</i> bekerja sebagai intelektual organik yang mengarahkan kesadaran pengguna melalui algoritma. Meskipun terdapat upaya kontra hegemoni melalui penggunaan bahasa kode (<i>algospeak</i>), hegemoni digital tetap dominan dalam membentuk perilaku swasensor (<i>self censorship</i>) mahasiswa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembatasan konten politik di <i>TikTok</i> merupakan bentuk kontrol sosial halus yang mengancam kualitas demokrasi di ruang publik digital.
Kata kunci: <i>TikTok;</i> <i>Pembatasan Konten;</i> <i>Mahasiswa Ilmu Komunikasi;</i> <i>Hegemoni Gramsci.</i>	

I. PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mengubah pandangan dari komunikasi politik secara radikal di seluruh dunia, tidak terkecuali di Negara Indonesia. *TikTok* yang pada awalnya dikenal sebagai platform digital yang digunakan untuk berbagi video pendek hiburan, kini telah berevolusi menjadi arena diskursus politik yang sangat berpengaruh bagi generasi muda. Fenomena ini tentu berdampak dalam

menciptakan paradoks pada suatu sisi platform digital yang lebih menawarkan demokratisasi suara. Namun, didalamnya juga masih mengandung mekanisme kontrol yang sangat ketat melalui algoritma dan kebijakan moderasi konten yang seringkali dianggap bias atau tidak transparan (Ramadani et al., 2025).

Bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi *TikTok* bukan sekadar aplikasi media sosial, melainkan sebuah artefak dalam bentuk budaya digital yang

memiliki struktur kekuasaan dan kebebasan tertentu. Sebagai kelompok yang memiliki literasi media yang tinggi dan konsumtif, mahasiswa mulai menyadari adanya pola pembatasan konten politik, baik melalui *shadowbanning* maupun penghapusan konten secara sepihak oleh *TikTok*. Masalah penghapusan konten yang muncul, terjadi ketika pembatasan ini tidak dipahami secara teknis semata, melainkan sebagai upaya sistematis dalam mengontrol opini publik di ruang siber.

Fenomena pembatasan konten secara teoretis, dapat dibedah menggunakan pemikiran Antonio Gramsci mengenai Hegemoni. *Gramsci* menjelaskan bahwa kekuasaan tidak selalu dijalankan melalui kekerasan atau paksaan fisik (dominasi), tetapi lebih sering melalui kepemimpinan intelektual dan moral yang menghasilkan konsensus atau persetujuan sukarela dari masyarakat (Shabri et al., 2023). Dalam konteks ini, platform *TikTok* bertindak sebagai penyedia infrastruktur yang mengarahkan apa yang layak dan tidak layak untuk dikonsumsi oleh massa.

Hegemoni digital di *TikTok* bekerja secara halus melalui algoritma *For You Page* (FYP). Ketika konten politik yang kritis dibatasi, platform sebenarnya sedang melakukan normalisasi terhadap konten-konten yang dianggap lebih aman dan menghibur. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa media massa dalam masyarakat moderen berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan *status quo* atau kelompok dominan, sehingga menciptakan sesuatu hal yang disebut sebagai kesadaran kolektif yang semu di kalangan pengguna *TikTok* (Bhayangkara et al., 2025).

Pentingnya meninjau platform digital saat ini untuk membedakan keberoperasian yang layaknya di negara Integral dalam konsep *Gramscian*, menjelaskan batasan antara masyarakat sipil dan masyarakat politik menjadi kabur menjelaskan bahwa *TikTok* sebagai perusahaan teknologi global, harus menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi penggunaanya dengan tuntutan regulasi dari pemerintah di berbagai negara (Kamindang et al., 2024). Seringkali, pembatasan konten politik adalah hasil dari negosiasi kepentingan antara korporasi dan kekuasaan negara demi stabilitas ekonomi dan politik.

Mahasiswa Ilmu Komunikasi sebagai subjek penelitian ini, berada dalam posisi yang unik. Mereka adalah intelektual muda yang mampu melihat di balik layar dalam operasional media. Pengalaman mereka dalam menghadapi pembatasan konten politik mencerminkan adanya ketegangan antara agensi individu dengan

struktur algoritma yang hegemonik. Kebanyakan dari mereka memaknai sensor halus ini menjadi kunci untuk memahami kualitas demokrasi digital kita saat ini. Dalam perspektif fenomenologi, pemaknaan mahasiswa terhadap pembatasan ini adalah sebuah realitas subjektif yang dikonstruksi berdasarkan interaksi mereka sehari-hari dengan aplikasi tersebut.

Ditinjau dari pemaknaannya, beberapa mahasiswa memaknainya sebagai bentuk perlindungan dari *hoaks*, namun ada pula yang melihatnya sebagai bentuk represi baru yang berbaju teknologi. Perbedaan pemaknaan ini menunjukkan bahwa hegemoni di ruang digital tidak pernah bersifat total. Selalu ada celah untuk memunculkan kesadaran kritis didalamnya. Selain itu, pembatasan konten politik di *TikTok* seringkali memicu yang disebut *Gramsci* sebagai *War of Position* (Perang Posisi) (Rijal, et al., 2025). Beberapa mahasiswa dan aktivis digital sering kali melakukan perlawanan dengan cara-cara kreatif, seperti mengubah ejaan kata sensitif atau menggunakan tren musik tertentu untuk membungkus pesan politik agar tidak terdeteksi oleh radar sensor algoritma pada *TikTok*. Tindakan inilah yang merupakan bentuk dari kontra hegemoni kecil yang terjadi secara terus-menerus di ruang digital.

Penelitian terdahulu menurut Gillespie menunjukkan bahwa algoritma bukan sekadar kode teknis, melainkan sebuah kebijakan redaksional yang diprivatisasi (Faustyna, 2024). Oleh karena itu, memahami subjek (mahasiswa ilmu komunikasi) dalam memaknai kebijakan tersebut sangatlah krusial. Tanpa pemaknaan yang kritis, masyarakat dan pengguna *TikTok* akan terjebak dalam ruang gema (*echo chamber*) yang telah didesain oleh pemilik platform untuk kepentingan ekonomi dan politik tertentu. Urgensi dalam penelitian ini, terletak pada upaya memetakan kembali posisi audiens di era pasca kebenaran (*post truth*). Dengan menggunakan penulis ingin melampaui data statistik penggunaan aplikasi dan masuk kedalam kesadaran mahasiswa mengenai hak-hak digital mereka.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, tujuan utama penelitian adalah untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan esensi pengalaman subjektif mahasiswa Ilmu Komunikasi dalam memaknai mekanisme pembatasan konten politik di *TikTok* sebagai bentuk hegemoni digital. Sebagai landasan untuk melihat pembatasan konten politik di *TikTok* yang dianggap sebagai kewajaran dan disepakati (konsensus) sehingga, menjadi sebuah bentuk dominasi yang

harus didekonstruksi melalui literasi komunikasi yang lebih kritis.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologi. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian untuk menggali kedalaman makna dan esensi dari pengalaman hidup (*lived experience*) individu terhadap suatu fenomena (Mamik, 2015). Dalam konteks ini, peneliti berusaha menangkap bagaimana mahasiswa Ilmu Komunikasi mengalami dan menginterpretasikan pembatasan konten politik di *TikTok* sebagai sebuah realitas yang mereka hadapi sehari-hari. Peneliti memposisikan diri untuk melakukan *epoché* atau *bracketing*, yaitu menunda segala asumsi awal mengenai moderasi konten *TikTok* agar dapat memahami kesadaran murni dari para informan tanpa bias teoretis yang prematur.

Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yang terdiri dari mahasiswa aktif Program Studi Ilmu Komunikasi di Universitas Pendidikan Nasional pada semester akhir yang memiliki keterlibatan tinggi dalam memproduksi atau mengonsumsi konten politik di *TikTok*. Kriteria ini menjadi hal penting karena, mahasiswa Ilmu Komunikasi diasumsikan memiliki sensitivitas teoretis terhadap isu-isu sensor dan kebijakan media. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) yang bersifat semi terstruktur untuk memberikan ruang bagi informan dalam mengekspresikan kesadaran mereka secara bebas. Selain itu, observasi partisipatif terhadap akun *TikTok* informan dilakukan untuk memvalidasi klaim mengenai pembatasan konten atau penurunan *engagement* yang mereka alami.

Proses analisis data mengikuti teknik analisis data yang dikembangkan oleh Moustakas, yang meliputi tahapan *horizontalization* (mengidentifikasi pernyataan penting), pengelompokan tema-tema makna (*thematic clustering*), mengkonstruksikan deskripsi struktural dan tekstural (Hardani et al., 2020). Analisis ini kemudian diintegrasikan dengan perspektif Hegemoni Antonio Gramsci untuk melihat tema-tema yang muncul dari pengalaman mahasiswa mencerminkan adanya persetujuan terhadap aturan platform atau justru menunjukkan perlawanan (kontra hegemoni). Keabsahan data diambil melalui teknik triangulasi sumber dan *member checking* untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti selaras dengan apa yang dirasakan oleh para mahasiswa.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara mendalam terhadap informan yang berjumlah lima mahasiswa Ilmu Komunikasi di Universitas Pendidikan Nasional, ditemukan bahwa pengalaman subjektif mereka terhadap pembatasan konten politik di *TikTok* tidak bersifat monolitik yang utuh dan tidak tidak terpisahkan. Penjelasan data terbagi atas tiga kategori makna yang dijabarkan. lebih lanjut penjabaran dapat digambarkan dalam rangkuman tabel di bawah ini:

Tabel 1. Tipologi Pemaknaan

Makna	Esensi	Respon	Konsep Gramsci
Konsensus Teknis	Pembatasan dianggap sebagai aturan rumah dari platform yang wajar demi kenyamanan.	Kepatuhan total terhadap panduan komunitas.	Hegemoni (<i>Consent</i>)
Dominasi Terselubung	Pembatasan dianggap sebagai bentuk sensor halus yang tidak transparan.	Penggunaan bahasa slang atau kode (<i>eufemisme</i>) untuk mengecoh AI.	<i>Counter Hegemony</i>
Negara Digital	<i>TikTok</i> dianggap memiliki otoritas layaknya negara yang mengatur opini publik.	Melakukan <i>cross platform</i> (pindah ke X atau Telegram).	<i>Integral State</i>

Data pada Tabel 1 di atas, menunjukkan adanya fragmentasi kesadaran di kalangan mahasiswa Ilmu Komunikasi. Penjelasan dari masing-masing tipologi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Makna Konsensus Teknis (The Consent of Convenience)

Pada kategori ini, informan memaknai pembatasan konten bukan sebagai sensor, melainkan sebagai fitur keamanan. Mahasiswa dalam kelompok ini cenderung menerima argumen platform bahwa pembatasan dilakukan untuk meminimalisir hate speech dan menjaga kesehatan ekosistem digital. Pengalaman subjektif mereka menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap algoritma dianggap sebagai bentuk kewajaran dalam berkomunikasi di ruang privat milik korporasi.

2. Makna Dominasi Terselubung (*The Invisible Oppression*)

Informan dalam kategori ini memiliki tingkat kecurigaan yang lebih tinggi. Mereka memaknai pembatasan seperti *shadowbanning* sebagai bentuk penindasan yang tidak memiliki parameter jelas. Esensi dari pengalaman mereka adalah rasa frustrasi karena merasa suara politik mereka yang dilenyapkan secara perlahan tanpa notifikasi resmi. Respon perilaku mereka adalah perlawanan aktif melalui modifikasi bahasa seperti penyamaran kata kunci (*hastage*).

3. Makna Negara Digital (The Digital Integral State)

Mahasiswa memaknai *TikTok* sebagai entitas yang memiliki otoritas politik yang melampaui bukan sekadar aplikasi media sosial. *TikTok* dianggap sebagai ruang publik yang telah terjajah oleh beberapa kepentingan seperti regulasi negara dan keuntungan ekonomi korporasi serta lainnya. Esensi maknanya adalah hilangnya kedaulatan pengguna atas konten mereka sendiri di hadapan kekuatan algoritma.

B. Pembahasan

Pembatasan konten politik di *TikTok* merupakan manifestasi nyata dari hegemoni digital. Hegemoni dalam konteks ini bekerja bukan melalui sensor total yang memicu kemarahan, melainkan melalui pengaturan visibilitas yang membuat pengguna "setuju" untuk mengikuti arus utama platform. Sebagaimana dijelaskan oleh Antonio Gramsci, hegemoni adalah kepemimpinan moral dan intelektual yang dicapai melalui persetujuan sukarela dari massa. Dalam kasus *TikTok*, persetujuan ini didapatkan dengan cara memberikan kenyamanan (hiburan) sehingga pengguna merelakan hak politiknya untuk dibatasi. Seperti yang diungkapkan oleh Christian Fuchs dalam studinya mengenai media sosial, platform seringkali menggunakan "logika partisipasi" yang sebenarnya menyembunyikan eksploitasi dan kontrol ideologis. Pengguna merasa sedang berpartisipasi dalam demokrasi digital, padahal mereka hanya bergerak dalam koridor yang telah ditentukan oleh pemilik modal.

"Social media are not just tools for communication but are embedded into the structures of capitalism, where communication becomes a commodity and user activity is

shaped by algorithmic power" (Nurjanah, 2025).

Pengalaman mahasiswa yang menggunakan bahasa kode untuk menghindari sensor menunjukkan adanya upaya kontra hegemoni. Dalam istilah Gramsci, ini adalah "*War of Position*" (Perang Posisi), yaitu perjuangan budaya kelas tertindas mencoba membangun benteng pertahanan di dalam institusi masyarakat sipil. Henry Giroux menekankan bahwa dalam era digital, literasi kritis adalah alat utama untuk melawan hegemoni. Mahasiswa Ilmu Komunikasi, dengan pemahaman teoritis mereka, bertindak sebagai individu yang mencoba menembus "kesadaran palsu" yang diciptakan oleh algoritma *TikTok*.

"The struggle for power is no longer just about controlling territories but about controlling the narratives and the visibility in the digital sphere" (Angelita, 2024).

Pada pemikiran Gramscian, setiap kelas sosial menciptakan satu atau lebih strata intelektual yang memberikannya homogenitas dan kesadaran akan fungsinya sendiri (Bhayangkara et al., 2025). *TikTok* menggunakan algoritma sebagai intelektual organik digital yang bertugas melakukan kurasi realitas. Hal ini sejalan dengan pendapat Tarleton Gillespie yang menyatakan bahwa moderasi konten bukanlah tindakan teknis semata, melainkan tindakan redaksional yang bersifat politis (Tambawang et al., 2024). Pembatasan konten politik adalah cara *platform* untuk memastikan bahwa ideologi kesopanan digital tetap terjaga demi keberlangsungan bisnis dan hubungan baik dengan otoritas politik.

Selanjutnya hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas informan memaknai pembatasan konten politik di *TikTok* bukan sebagai gangguan teknis, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial yang terorganisir. Dalam perspektif Gramsci, ini merupakan manifestasi dari kekuasaan yang bekerja melalui masyarakat sipil digital (Laudya et al., 2025). *TikTok* berhasil menciptakan "persetujuan spontan" bagi pengguna yang merasa bahwa moderasi konten adalah demi keamanan bersama, padahal secara tidak sadar mereka sedang dijauhkan dari isu-isu politik yang fundamental.

Hegemoni bekerja melalui algoritma yang berperan sebagai intelektual organik baru. Algoritma tidak hanya menyaring data, tetapi juga membentuk selera dan kesadaran politik

pengguna (Nurmala et al., 2022). Mahasiswa memaknai bahwa ketika konten mereka terkena *shadowban*, mereka merasa ditentukan langsung. Hal ini selaras dengan argumen bahwa platform digital moderen menggunakan algoritma untuk menciptakan tatanan sosial yang stabil dan menguntungkan pasar (Faustyna, 2024). Selain itu, fenomena bahasa kode atau *algospeak* seperti menulis "politik" atau "d3monstrasi" yang ditemukan dalam pengalaman informan merupakan bentuk nyata dari *War of Position* (Perang Posisi). Mahasiswa Ilmu Komunikasi menggunakan modal intelektual mereka untuk melakukan subversi terhadap struktur dominan. Mereka menyadari adanya hegemoni, dan meskipun tidak dapat meruntuhkan *platform* (*War of Maneuver*), mereka membangun benteng-benteng pertahanan budaya kecil di dalam ekosistem tersebut. Namun, penelitian ini juga menemukan adanya aspek kesadaran palsu yang sangat canggih. Contohnya, beberapa mahasiswa merasa tetap bebas berekspresi selama mereka mengikuti "*tren*". Padahal, *tren* sendiri adalah batasan yang diciptakan *platform*. Disinilah hegemoni mencapai puncaknya sehingga, ketika individu merasa bebas dalam sebuah kotak yang dinding-dindingnya tidak terlihat (Kamindang et al., 2024). Pembatasan konten politik dimaknai sebagai kebijakan redaksional yang harus diterima jika ingin tetap eksis di ruang publik digital.

Pada ruang negara Integral, kepentingan korporasi (*profit*) dan kepentingan politik memiliki stabilitas untuk bertemu. Mahasiswa menyadari bahwa *TikTok* cenderung membatasi konten politik yang bersifat radikal atau mengganggu stabilitas nasional karena adanya tekanan dari pemerintah. Ini membuktikan bahwa *platform* bukan sekadar alat komunikasi netral, melainkan perpanjangan tangan dari struktur kekuasaan yang lebih besar. Pemaknaan informan juga menyentuh aspek kepemimpinan moral. *TikTok* juga mempromosikan nilai-nilai "positivitas" dan "hiburan" sebagai standar moralitas *platform* (Rizquillah et al., 2025). Konten politik yang berat atau penuh kritik seringkali dianggap melanggar estetika positif tersebut. Mahasiswa Ilmu Komunikasi melihat ini sebagai upaya mendepolitisasi generasi muda secara perlahan melalui banjir konten hiburan yang hegemonik.

Ketidaktansparanan algoritma dalam melakukan pembatasan konten menciptakan rasa ketidakpastian yang oleh informan dimaknai sebagai teror halus. Ketidaktahuan akan kapan sebuah konten akan dihukum oleh algoritma memaksa pengguna untuk melakukan sensor diri (*self censorship*) (Rijal, et al., 2025). Secara teoretis, sensor diri adalah pencapaian tertinggi dari hegemoni, menjadi kontrol tidak lagi datang dari luar, melainkan dari dalam kesadaran individu itu sendiri. Mereka tidak sekadar menjadi konsumen pasif, tetapi juga menjadi pengamat yang mendekonstruksi cara kerja *platform*. Melalui pemaknaan yang kritis ini, mereka mulai membangun narasi tandingan (kontra hegemoni) melalui diskusi-diskusi di luar *platform TikTok*, guna menyebarkan kesadaran akan pentingnya netralitas algoritma. Dengan demikian, pengalaman mahasiswa terhadap pembatasan konten di *TikTok* adalah sebuah dialektika antara ketertundukan dan perlawanan. Mereka terjebak dalam struktur hegemonik yang sangat kuat, namun kesadaran kritis mereka memungkinkan adanya negosiasi makna. Pembatasan konten politik akhirnya dimaknai sebagai tantangan bagi demokrasi digital, di mana kekuasaan untuk menentukan kebenaran kini berada di tangan barisan kode algoritma yang dikendalikan oleh elit teknologi global.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemaknaan mahasiswa Ilmu Komunikasi terhadap pembatasan konten politik di *TikTok* merupakan sebuah dialektika antara ketertundukan teknis dan resistensi kritis. Esensi pengalaman mahasiswa menunjukkan bahwa pembatasan tersebut tidak lagi dipahami sebagai sekadar gangguan algoritma, melainkan sebagai manifestasi hegemoni digital yang bekerja melalui persetujuan spontan (*spontaneous consent*). Mahasiswa cenderung terjebak dalam ruang di mana *platform* bertindak sebagai otoritas moral yang menentukan batas-batas diskursus politik yang dianggap aman atau layak sehingga, menciptakan standarisasi opini publik yang halus namun sistematis.

Melalui teori Gramscian, pembatasan konten di *TikTok* dikonstruksi sebagai bentuk *State* (Negara) dalam dimensi integral dengan kepentingan korporasi teknologi berkelindan dengan stabilitas politik nasional. Namun,

literasi media yang dimiliki mahasiswa Ilmu Komunikasi memungkinkan munculnya benih-benih kontra-hegemoni melalui strategi *War of Position* (Perang Posisi). Praktik penggunaan bahasa kode (*algospeak*) dan pemanfaatan fitur kreatif lainnya menjadi bukti bahwa hegemoni digital tidak bersifat total. Meskipun berada dalam struktur kekuasaan yang hegemonik, mahasiswa tetap berupaya merebut kembali kedaulatan informasi mereka dengan cara-cara subversif di tengah ketatnya moderasi konten platform. Dengan demikian, perlunya redefinisi ruang publik digital yang lebih transparan dan demokratis. Pembatasan konten politik yang tidak transparan berpotensi mengikis nalar kritis warga negara dan memperkuat kesadaran palsu yang didesain oleh algoritma.

B. Saran

Bagi para akademisi dan praktisi komunikasi untuk terus mendorong transparansi algoritma sebagai bagian dari hak asasi digital, guna memastikan bahwa media sosial tetap menjadi sarana kontestasi ide yang sehat, bukan sekadar instrumen pengontrol kesadaran massa yang melayani kepentingan *status quo*.

DAFTAR RUJUKAN

- Angelita, N. R. D. & J. A. K. (2024). Pemaknaan Penonton Perempuan Terhadap Beauty Influencer. *12*(1), 49–62.
- Bhayangkara, U., Raya, J., Bhayangkara, U., Raya, J., Bhayangkara, U., & Raya, J. (2025). TANGGUNG JAWAB ETIKA DAN REGULASI PLATFORM DIGITAL DALAM MENANGANI ANCAMAN DISINFORMASI PADA MEDIA TIKTOK. *2*(7), 9238–9245.
- Faustyna. (2024). Strategi Komunikasi Krisis Public Relations Digital di TikTok pada Dinas Pariwisata Medan Selama Pandemi COVID-19: Analisis Kasus Pengelolaan Konten Inovatif. *22*(2), 288–307.
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Pustaka Ilmu.
- Izzati, F., Firamadhina, R., & Krisnani, H. (2016). PERILAKU GENERASI Z TERHADAP PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL TIKTOK: TikTok Sebagai Media Edukasi dan Aktivisme. *0042*, 199–208.
- <https://doi.org/10.24198/share.v10i2.31443>
- Kamindang, I., Amijaya, M., Pemerintahan, I., Tadulako, U., Politik, A., Politik, K., Politik, P., Actors, P., & Parties, P. (2024). TIKTOK SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI POLITIK AKTOR. *9*(1), 1–15.
- Laudya, D. S., Siahaan, P. G., Purba, N. R., Fani, R., Giawa, A., Manurung, R. C., Putri, F. Y., Nasution, I. M., & Saragih, Y. B. (2025). Dampak Polarisasi Media Sosial Terhadap Hak Kelompok Minoritas Dalam Menyampaikan Pendapat. *4*(2), 1544–1550.
- Mamik. (2015). *Metode Kualitatif*. Zifatama Publisher.
- Nurjanah, N. (2025). Analisis Framing Media Digital Terhadap Pemberitaan Demonstrasi di Indonesia. *13*(2), 187–204.
- Nurmala, M. D., Afrizal, S., Umar, T., & Hadi, S. (2022). Dampak Penggunaan Aplikasi TikTok Terhadap Perubahan Perilaku Sosial Mahasiswa - *Jurnal Hermeneutika*, *8*(1).
- Ramadani, N., Pratiwi, F. S., Syafi, K., & Nursafitri, D. (2025). Representasi Politik melalui Media Sosial : Analisis Framing Legislator terhadap Isu Publik. *1*(4), 2005–2017.
- Rijal, Rizqi Awalul, Abdul Haris Fatgehipon, M. (2025). PERILAKU POLITIK MAHASISWA GENERASI Z POST-TRUTH ON TIKTOK : ITS IMPACT ON THE POLITICAL BEHAVIOR. 3174–3178.
- Rizqullah, M. S., Arianti, G., Haroni, N., & Meutia, C. (2025). Media Sosial TikTok dalam Fenomena Matinya Kepakaran (Studi Netnografi pada Dokumenter “ Dirty Vote”). *7*(3), 1682–1692.
- Shabri, A. N., Ghivari, R. Al, & Alkatiri, N. F. (2023). Analisis Resepsi Mahasiswa Terhadap Pemberitaan Pemblokiran TikTok Shop di Indonesia. 1124–1134.
- Tambawang, L., Sawir, M., & Pongtuluran, R. (2024). Melihat ke Belakang: Panggung Gemoy dan Dinamika Politik Masa Kini. 182–192.